

Horizontal Fiscal Disparities and Local Services Inequalities: A Survey of Eight Years Fiscal Decentralisation in Indonesia

Hefrizal Handra

Abstract

This study explores the condition of fiscal disparities and inequality of local services between localities in Indonesia after eight years implementation of fiscal decentralisation policies (2001-2008). This study is inspired by Faquet(1997), Prudhome(1995) dan Bahl(1998) which argued that the decentralisation tend to increase inter-regional inequalities. It is also a continuation of Handra(2005d)'s study which examine the impact of Indonesia's fiscal equalisation policy in the early stage of decentralisation.

As an exploratory research, it describes the condition and the trend of fiscal disparities between all local governments in Indonesia. Furthermore this research examines the comparison of fiscal disparities and local services condition of four selected localities. The case localities are chosen based on Human Development Index (HDI) and fiscal capacities. Two localities, Bengkalis and Agam are chosen from the groups of relatively high HDI with different fiscal capacities. Then, other two localities, Indramayu dan Sambas, represent relatively low HDI regions.

The data shows that the Central Government is consistent in implementing fiscal decentralisation policies during 2001-2009. The amount of fund transferred by Central Government to regions has been maintained averagely at 33% of Central Government revenue (CGR) during 2001-2009. Fiscal disparities between local governments have also been maintained at the same level during 2001-2008 shown by the williamson index. However, there was a redistribution of transfer funds from local governments in Java to others outside Java.

Comparison of four localities shows that fiscal disparities between them did not widen the disparities in local services especially for educational and health services. This finding is different from what has been indicated by Handra(2005a) that the fiscal disparities are potential to widen the inequality in the level of local services. The case study examines that the locality with low fiscal capacities is able to increase the level of services higher then the locality with high fiscal capacities. The key success factor of such locality is that the programs/activities which have been designed to improve the HDI were fully supported by the local government budget and public participations.

Keywords: fiscal decentralisation, horizontal fiscal disparities, local services inequalities.

1. Latar Belakang

Tidak lama setelah kebijakan desentralisasi digulirkan oleh Pemerintah muncul indikasi meningkatnya ketimpangan fiskal antar daerah. Handra(2005d) menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal antar daerah kabupaten/kota pada tahun 2001 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 1999/2000 jika diukur dengan koefisien variasi dari pendapatan daerah. Sejalan dengan itu pada awal desentralisasi juga terdapat ketimpangan tingkat pelayanan publik antar daerah terutama dibidang pelayanan pendidikan diukur dengan angka partisipasi (Handra, 2006).

Meningkatnya ketimpangan antar daerah setelah desentralisasi sesungguhnya sudah diperkirakan oleh banyak pakar diantaranya Faquet (1997), Prudhome (1995) dan Bahl (1998). Untuk itu di Negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi perlu mekanisme pemerataan fiskal antar daerah untuk meminimumkan tingkat ketimpangan. Desentralisasi fiskal di Indonesia yang diawali dengan UU 25/1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU 33/2004 sesungguhnya telah menyediakan mekanisme pemerataan fiskal antar daerah dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU adalah salah satu jenis dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sasaran untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 21 UU 33/2004:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Mekanisme pemerataan semakin diperkuat dengan disediakan DAK yang ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (penjelasan UU 33/2004).

Meskipun sudah ada mekanisme pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, namun Handra(2005a) menemukan bahwa tingkat ketimpangan pelayanan publik antar daerah berpotensi semakin melebar akibat kurangnya sinkronisasi berbagai sumber pendanaan pelayanan publik di daerah. Dikhawatirkan ketimpangan antara daerah dapat mengancam pencapaian tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/MDGs) di daerah tertentu, padahal Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk mencapai MDGs pada tahun 2015.

Tulisan ini menggali informasi terkini tentang kondisi desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pemerataan pelayanan publik antar daerah.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pemerataan pelayanan publik serta pencapaian MDGs di daerah tertentu di Indonesia. Desentralisasi fiskal yang telah terwujud dalam bentuk keleluasaan Pemda dalam mengalokasikan dana desentralisasi semestinya mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja Pemda, khususnya untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang telah menjadi tugas/fungsi daerah. Namun apabila distribusi sumber daya antar daerah sangat timpang tentunya akan menimbulkan ketimpangan tingkat pelayanan publik antar daerah. Untuk itu tulisan ini akan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan fiskal antar daerah kabupaten/kota saat ini?
2. Dengan sistem transfer (dana perimbangan) yang dijalankan saat ini, apakah ketimpangan fiskal antar daerah semakin meningkat atau turun?
3. Sejauhmana ketimpangan fiskal antar daerah berdampak terhadap ketimpangan tingkat pelayanan publik antar daerah?

Mengingat pelayanan publik mencakup berbagai jenis/bidang pelayanan, maka tulisan ini membatasi analisis pada lingkup pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembatasan ruang lingkup pelayanan publik yang diteliti tidak hanya disebabkan keterbatasan waktu penelitian, namun juga karena ketersediaan indikator pelayanan untuk kedua bidang ini cukup maju dibanding bidang lainnya.

3. Metodologi

Tulisan ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Ketimpangan fiskal antara daerah digambarkan dengan statistik deskriptif dari data kapasitas fiskal seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber antara lain Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta. Namun data tersebut tidak menggambarkan secara detil kondisi masing-masing daerah. Umumnya data tersebut adalah merupakan data olahan.

Untuk melihat lebih detil dan rinci tentang ketimpangan fiskal dan ketimpangan pelayanan publik antar daerah perlu dilakukan eksplorasi mendalam terhadap beberapa daerah dan kemudian dilakukan analisis perbandingan antar daerah. Artinya tulisan ini menggunakan kombinasi pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif. Studi kasus dimaksud adalah perbandingan tingkat pelayanan antar daerah tertentu.

4. Tinjauan Teoritis

4.1. Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola

pendapatan/ perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Definisi desentralisasi fiskal tersebut sejalan dengan yang diberikan oleh Davey(2003):

“*Fiscal decentralisation* is the division of public expenditure and revenue between levels of government, and the discretion given to regional and local government to determine their budgets by levying taxes and fees and allocating resources”.

Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

4.2. Pemerataan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Pemerataan fiskal (Fiscal equalisation) dipraktekkan oleh banyak negara di dunia, baik negara federasi maupun negara kesatuan. Pendekatan ini adalah untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal (fiscal disparities) diantara daerah-daerah yang se-level. Misalnya di negara federal, ada program pemerataan fiskal antar negara bagian dan program pemerataan fiskal antar daerah di dalam negara bagian masing-masing. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara kesatuan (unitary). Program ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-daerah pada posisi fiskal yang sama untuk menjalankan tugasnya.

Program pemerataan fiskal dilakukan dengan berbagai cara didasarkan kepada prinsip tertentu dan sasaran yang ingin dicapat oleh negara tersebut. Di Kanada, sebagai contoh, sasaran dari pemerintah federalnya adalah untuk memberdayakan setiap propinsinya dapat menyediakan pelayanan publik pada tingkat yang relatif sama kepada seluruh penduduknya dengan pengenaan tingkat pajak yang relatif sama pula (Fiscal Federalism in Canada, 1981). Demikian juga halnya dengan Australia dimana sasaran yang dideklarasikan adalah untuk mengoreksi ketidakmerataan fiskal horizontal (horizontal fiscal imbalance) yang berarti ketidakmampuan negara bagian untuk menyediakan pelayanan dengan standar nasional tertentu kepada penduduknya pada tingkat pajak yang relatif sama (Mathews, 1994).

Sedikit berbeda dengan Kanada dan Australia, kebijakan pemerataan fiskal di Jepang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan fiskal pemerintah daerah agar dapat menutupi kebutuhan fiskal dasarnya dan mencapai keseragaman tingkat pelayanan lokal (Mihaljek, 1997). Program pemerataan di Jepang fokus kepada pemerataan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah, sedangkan di Kanada dan Australia difokuskan kepada pemerataan fiskal antar negara bagian/propinsi, sedangkan pemerataan fiskal antar daerah dalam negara bagian adalah urusan negara bagian masing-masing.

Hampir sama dengan Jepang, objektif dari program pemerataan fiskal di negara-negara Skandinavia adalah agar seluruh otoritas lokal dapat menghadapi perbedaan lingkungan luar dalam hak kebutuhan belanja dan basis pajak (Lotz, 1997). Lebih lanjut Lotz menambahkan bahwa di negara-negara tersebut, program pemerataan difokuskan untuk pemerataan kapasitas pemerintah lokal untuk menyediakan pelayanan publik pada level minimum standar bukan untuk pemerataan standar kehidupan (living standard) setiap individunya. Secara kontras, di Jerman, program pemerataan fiskal memang ditujukan untuk pemerataan standar kehidupan seluruh penduduknya (Ahmad, 1997).

Meskipun beberapa negara memiliki sasaran yang hampir sama untuk program pemerataan fiskalnya, namun penerapannya bisa saja berbeda. Sebagai contoh, Australia dan Kanada memiliki sasaran pemerataan fiskal yang sama, namun model yang digunakan dalam programnya sangat berbeda. Sistem di Kanada hanya mengupayakan pemerataan kapasitas fiskal tanpa mempertimbangkan kebutuhan fiskal dari propinsi-propinsinya. Sedangkan sistem pemerataan fiskal di Australia mengakomodasi keduanya (kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal). Sistem Pemerataan Fiskal di Australia dikenal sebagai salah satu sistem yang paling komprehensif di dunia (Rye & Searle, 1997).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa program pemerataan fiskal dirancang untuk membantu daerah yang rendah pendapatannya dan/atau tinggi biaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah yang tinggi pendapatannya dan/atau rendah biaya pelayanannya (Walsh & Thomson, 1994). Meskipun demikian, tidak akan pernah ada sistem pemerataan fiskal yang sempurna. Yang terjadi pada prakteknya adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal diantara daerah yang se-level sampai ke tingkat yang dapat diterima (acceptable level).

4.3. Tingkat Ketimpangan Fiskal dan Ketimpangan Pelayanan Publik Antar Daerah

Upaya untuk melakukan pemerataan fiskal antar daerah dapat dilakukan dalam berbagai cara. Namun dipercaya bahwa tidak akan pernah ada sistem yang dapat melakukan pemerataan secara sempurna. Upaya untuk melakukan pemerataan sempurna adalah sangat tidak realistis. Tingkat ketimpangan fiskal akan tetap selalu ada di sistem manapun. Untuk itu tingkat ketimpangan fiskal perlu dikelola.

Mengelola ketimpangan fiskal untuk lebih dari 500 daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah pekerjaan yang sangat sulit jika semua daerah harus di nilai secara regular oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, sebuah prosedur yang sistematis diperlukan untuk menilai kesuksesan dari program pemerataan fiskal.

Salah satu cara untuk mengelola tingkat ketimpangan fiskal adalah dengan melakukan pemantauan (monitoring) secara reguler terhadap tingkat ketimpangan pelayanan publik antar daerah. Sebab salah indikator keberhasilan program pemerataan fiskal adalah perbedaan tingkat pelayanan publik antar daerah. Program pemerataan fiskal yang sukses dinilai dari keberhasilannya dalam membawa tingkat ketimpangan pelayanan publik ke level yang dapat diterima. ***Tingkat ketimpangan yang dapat diterima adalah kondisi dimana daerah-daerah yang miskin pun memiliki tingkat pelayanan minimum tertentu.*** Daerah-daerah kaya boleh saja memiliki kemampuan fiskal untuk menyediakan tingkat pelayanan yang jauh lebih baik, namun daerah-daerah yang miskin harus memiliki kemampuan fiskal untuk dapat menyediakan pelayanan minimum tertentu.

Standar pelayanan minimum (SPM) pada dasarnya dapat dikaitkan dengan upaya pencapaian target MDGs di Indonesia. Artinya, penyediaan pelayanan di daerah pada tingkat SPM nasional juga berarti suatu upaya untuk meujudkan target MDGs. Untuk itu salah satu cara untuk meng-evaluasi keberhasilan dari program pemerataan fiskal adalah apabila sistem itu dapat mendorong setiap daerah untuk mencapai target MDGs.

4.4. Penelitian Sebelumnya

Handra(2005d) telah menghitung ketimpangan fiskal antar daerah kabupaten/kota sebelum dan sesudah desentralisasi dengan *coefficient of variation* (CV). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan fiskal pada tahun 2001, tepat pada saat sistem desentralisasi fiskal yang baru diimplementasikan di Indonesia. Ada kecenderungan penurunan ketimpangan fiskal dari 2001 ke 2003, namun tingkat ketimpangan masih lebih tinggi dibanding era orde baru. Selanjutnya Handra(2005d) juga menemukan bahwa terdapat ketimpangan tingkat pelayanan yang cukup tinggi, khususnya pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar antara daerah kota dan daerah kabupaten, serta antar daerah kaya sumber daya dengan daerah miskin. Selanjutnya Handra(2005a) juga menemukan bahwa terdapat potensi peningkatan ketimpangan antar daerah. Namun penelitian yang mengkaitkan antara tingkat ketimpangan fiskal dengan pencapaian target MDGs belum ditemukan.

5. Analisis dan Diskusi

5.1. Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan desentralisasi fiskal adalah jumlah pendapatan negara yang ditransfer untuk dibelanja oleh Pemerintah Daerah, yang dapat diukur dengan rasio transfer terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN). PDN merupakan pendapatan Negara berupa pajak dan bukan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Artinya pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak termasuk ke dalam bagian PDN karena kewenangannya diserahkan kepada Pemda. Peningkatan rasio transfer terhadap PDN menggambarkan terjadinya peningkatan tingkat desentralisasi fiskal

Pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2009 terlihat bahwa jumlah dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah telah meningkat drastis dari sekitar 15% pendapatan dalam negeri (PDN) di tahun 1999 menjadi 35% PDN di tahun 2009. Ini berarti bahwa pada tahun 2009, lebih dari sepertiga pendapatan dalam negeri pemerintah dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Karena sebagian besar dana transfer tersebut merupakan dana yang bebas dialokasikan oleh Pemda, maka berarti Pemda memiliki keleluasaan yang besar untuk mengalokasikannya bagi peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1. Perkembangan Rasio Transfer Ke Daerah Terhadap Pendapatan Dalam Negeri

Tahun Anggaran	Pendapatan Dalam Negeri (PDN)	Transfer Ke Daerah	Rasio Transfer/PDN	Keterangan
1999/2000	204.4	29.9	14.6%	Realisasi
2000	273.8	44.1	16.1%	Realisasi
2001	299.7	81.1	27.1%	Realisasi
2002	298.5	98.2	32.9%	Realisasi
2003	340.9	120.3	35.3%	Realisasi
2004	403	130	32.3%	APBNP
2005	493.9	150.5	30.5%	Realisasi
2006	636.2	226.2	35.6%	Realisasi
2007	706.1	253.3	35.9%	Realisasi
2008	979.3	292.4	29.9%	Realisasi
2009	871.6	309.6	35.5%	APBNP

Sumber: Diolah dari Data di Depkeu RI tersedia di <http://www.depkeu.go.id>

5.2. Kecenderungan Ketimpangan Fiskal Antar Daerah

Banyak metode untuk mengukur ketimpangan fiskal antara daerah. Pada penelitian ini digunakan tiga ukuran: (1) koefisien variasi (KV), (2) indeks williamson (IW), (3) rasio pendapatan perkapita maksimum terhadap pendapatan perkapita minimum (RMM). Hasil perhitungan di tabel 5.5 memperlihatkan beberapa hal:

1. Angka koefisien variasi memperlihatkan bahwa ketimpangan fiskal antar daerah kabupaten/kota dalam periode 2001-2008 tidak mengalami perbaikan dan juga tidak mengalami pemburukan. Tingkat ketimpangan dalam periode ini masih jauh lebih tinggi dibanding tingkat ketimpangan tahun 1999/2000. Jika pada tahun 2001 KV terhitung sebesar 1,16 (yang berarti standar deviasi 1,16 kali rata-rata) maka pada tahun 2008 KV terhitung 1,13.
2. Rasio pendapatan perkapita maksimum dengan minimum (RMM) memperlihatkan bahwa dalam periode 2001-2008 terjadi peningkatan ketimpangan. Jika pada tahun 2001 RMM adalah 60:1 (pendapatan perkapita daerah terkaya adalah 60 kali pendapatan perkapita daerah termiskin), maka pada tahun 2008 RMM meningkat menjadi 69:1.
3. Angka indeks williamson (IW) ternyata tidak memperlihatkan peningkatan ketimpangan fiskal antar daerah. Pada tahun 2008, angka IW adalah 0,7 sama dengan angka IW pada tahun 2001. Artinya, diukur dengan IW, ketimpangan fiskal antar daerah tidak dapat dikatakan mengalami pemburukan, namun juga tidak membaik.

Tabel 2. Tingkat Ketimpangan Fiskal Antar Daerah

	Pendapatan Perkapita 1999/2000	Pendapatan Perkapita 2001	Pendapatan Perkapita 2002	Pendapatan Perkapita 2008
Rata-rata (rupiah)	205,044	616,643	705,198	2,505,932
Koefisien Variasi (KV)	0,76	1,16	1,02	1.13
Rasio Pendapatan Per Kapita Maksimum dan Minimum (RMM)	32:1	60:1	42:1	69:1
Williamson Index	-	0,70	0,67	0,70

Sumber: Diolah dari data di Depkeu dan Handra(2005b),

Dari tiga indikator ketimpangan fiskal, dua indikator (KV dan RMM) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan fiskal antara daerah, namun indikator IW tidak menyimpulkan hal yang sama. Studi kasus empat daerah (kabupaten Agam, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sambas) memperlihatkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan fiskal antar keempat daerah. Perbandingan belanja per kapita antara Kabupaten Bengkalis (terkaya) dengan Kabupaten Indramayu (termiskin) menurun dari 10:1 di tahun 2002 menjadi 6:1 di tahun 2008. Artinya, walaupun terjadi peningkatan belanja daerah per kapita di seluruh kabupaten, tidak memperlebar jarak antara yang terendah dengan yang tertinggi. Hal itu dapat dilihat di tabel 5.6 dimana pertumbuhan tahunan rata-rata belanja perkapita kabupaten Indramayu lebih tinggi dari kabupaten Bengkalis, sehingga jarak keduanya tidak melebar.

Pertumbuhan belanja per kapita di Kabupaten Indramayu yang lebih tinggi dari Kabupaten Bengkalis ternyata disebabkan oleh pertumbuhan tahunan dana transfer ke Kabupaten Indramayu yang jauh lebih besar pertumbuhan tahunan dana transfer ke Kabupaten Bengkalis. Sebagai gambaran, pada tahun 2002 jumlah dana transfer untuk Indramayu adalah Rp. 334,6 milyar, naik secara bertahan hingga pada tahun 2008 berjumlah sebesar Rp. 870,7 milyar, yang berarti tumbuh sebesar 17% setiap tahunnya dalam periode 2002-2008. Sedangkan dana transfer ke Bengkalis pada tahun 2002 berjumlah Rp. 953,9 milyar, naik perlahan hingga pada tahun 2008 berjumlah sekitar Rp. 1,6 triliun, yang berarti hanya tumbuh sebesar 9 % setiap tahunnya dalam periode 2002-2008.

Tabel 3. Perbedaan Belanja Per Kapita 2002 dan 2008

Tahun	Kab. Agam	Kab. Bengkalis	Kab. Indramayu	Kab. Sambas	Rasio Maksimum dan Minimum
2002	461,296	2,559,471	251,730	477,337	10:1
2008	1,509,697	3,916,461	612,113	1,212,529	6:1
Pertumbuhan Tahunan Rata-Rata	21.8%	7.3%	16.0%	16.8%	

Sumber: Diolah dari data APBD masing-masing Kabupaten dan data di Ditjen PK, Depkeu, RI.

5.3. Ketimpangan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Tingkat Pelayanan Publik Antar Daerah

Salah satu indikator dari pelayanan publik di daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator, yaitu indikator pelayanan pendidikan, indikator pelayanan kesehatan dan indikator daya beli masyarakat. Indikator di bidang pendidikan terdiri dari dua jenis, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan indikator di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Terakhir indikator daya beli masyarakat yaitu pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan tingkat daya belinya di daerah (PPP).

Diantara empat kabupaten tersebut, yang paling tinggi peningkatan angka IPMnya dalam periode 2002-2007 adalah Indramayu dengan peningkatan sebesar 5,02 poin. Sedangkan yang mengalami peningkatan IPM terendah adalah Kabupaten Sambas. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kemampuan fiskal daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja pelayanan di daerah. Kemampuan fiskal Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002 sepuluh kali kemampuan fiskal Kabupaten Indramayu, namun Kabupaten Indramayu mampu meningkatkan angka IPM lebih tinggi dari Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

	2002	2007	Selisih
Agam	68	72.06	4.06
Bengkalis	69.4	73.36	3.96
Indramayu	61.2	66.22	5.02
Sambas	59.3	63.01	3.71

Sumber: Diolah dari data IPM 2002 dan 2007 yang bersumber dari BPS

Kemampuan Kabupaten Indramayu menaikkan angka IPM lebih tinggi dari tiga kabupaten lainnya adalah terutama karena keberhasilan mereka dalam menaikkan angka melek huruf (AMH). AMH Kabupaten Indramayu naik tajam sebesar 7,38 poin. Beberapa program unggulan yang menyebabkan kenaikan tajam indikator pendidikan Kabupaten Indramayu adalah

- Adanya program pemberantasan buta huruf yang diberi nama Paket A-KF (Paket A-Keaksaraan fungsional). Paket A-KF berbeda dengan paket A setara SD, di Indramayu diatur dalam sebuah peraturan daerah tentang melek huruf. Paket pendidikan melek huruf ini difokuskan kepada penduduk usia produktif (umur 15-55 tahun). Paket A-KF dilengkapi dengan paket wirausaha sehingga penduduk tertarik untuk berusaha dan berdampak terhadap perekonomian. Paket A-KF menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan IPM karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan efektif. Fokus dalam pemberantasan buta huruf didorong juga oleh besarnya bobot Angka melek huruf dalam perhitungan indikator bidang pendidikan IPM (mengambil porsi 2/3).
- Sedangkan dalam rangka mendorong peningkatan angka RLS, di Indramayu terdapat program rintisan wajib belajar 9 tahun. Program ini melibatkan segenap *stakeholder* pendidikan di daerah. Dalam internal Pemda diperkenalkan kontrak kinerja antara Kepala Daerah dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan dengan Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK. Kepala UPTD Pendidikan di Kecamatan melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Sekolah SD. Untuk mendorong partisipasi alim ulama, diberikan insentif kepada pengurus mesjid. Setiap kepala Sekolah diwajibkan memantau murid, dan diberi target kelulusan termasuk melanjutkan.
- Program yang mendorong peningkatan RLS juga didukung oleh program gempur gakin (gempur keluarga miskin). Program ini merupakan program swadaya masyarakat yang diinisiasi oleh Pemda. Organisasi masyarakat yang diberinama "Gempur Gakin" merupakan kumpulan tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul *self-funding*, tanpa bantuan dari Pemda. Pemda memang pernah membantu di awal pembentukannya. Kemudian organisasi ini berjalan sendiri dari dana masyarakat. Sumbangan dari masyarakat ini kemudian disalurkan untuk membantu keluarga miskin yang mengalami masalah dalam pendidikan anak dan pelayanan kesehatan.
- Inisiatif Pemerintah Kabupaten, didorong juga oleh Pemerintah Propinsi yang merintis program kompetisi peningkatan IPM mulai tahun 2006 di Propinsi Jawa Barat. Program ini tersosialisasi dengan baik dan melibatkan seluruh komponen pemerintahan sampai ke Camat. Camat kemudian didorong untuk melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menetapkan program masing-masing. Pemda menyediakan *reward* bagi kecamatan yang berhasil dan memberi *punishment* bagi yang kurang baik kinerjanya. Kecamatan terdorong untuk berimprovisasi dalam menjalankan program A-KF (kelompok belajar).

Tabel 5. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2002-2007

Kabupaten	2002		2007		Selisih	
	AMH	RLS	AMH	RLS	AMH	RLS
Agam	95.5	7.8	97.82	8.2	2.32	0.4
Bengkalis	95.3	8.2	97.29	8.6	1.99	0.4
Indramayu	78.2	5.1	85.58	5.5	7.38	0.4
Sambas	89.3	5.7	89.5	5.9	0.2	0.2

Sumber: Diolah dari data IPM 2002 dan 2007 yang bersumber dari BPS

Perbandingan empat kabupaten dalam indikator Angka Harapan Hidup (AHH) memperlihatkan bahwa dalam periode 2002-2007 terjadi peningkatan AHH yang tertinggi di Kabupaten Sambas. Peningkatan AHH di Sambas merupakan dampak dari perbaikan tingkat pelayanan kesehatan dan didukung oleh program jaminan kesehatan daerah. Pemda Kabupaten Sambas cukup serius dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Jumlah puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling), tenaga kesehatan bertambah secara signifikan dalam periode tersebut. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Sambas masih jauh di bawah tiga kabupaten lainnya. Perlu upaya yang lebih besar lagi untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Tabel 6. Angka Harapan Hidup (AHH)

	2002	2007	Selisih
Agam	67.3	68.56	1.26
Bengkalis	69.1	70.06	0.96
Indramayu	63.7	65.62	1.92
Sambas	58	60.48	2.48

Sumber: Diolah dari data IPM 2002 dan 2007 yang bersumber dari BPS

5.4. Ketimpangan Pelayanan Bidang Pendidikan dan Pencapaian MDGs

Selanjutnya dianalisis, apakah target MGDs di daerah yang tingkat pelayanan publiknya rendah bisa tercapai pada tahun 2015. Perbandingan jumlah SD/MI dan SLTP di empat kabupaten pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa tingkat pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun khususnya tingkat SLTP di Kabupaten Sambas cukup memprihatinkan. Rasio SD/SLTP adalah 8,1 yang berarti untuk delapan SD hanya tersedia satu SLTP. Rasio terendah berada di Kabupaten Bengkalis yaitu 2,5 SD untuk tiap SLTP. Jumlah SLTP yang relatif sedikit di Kabupaten Sambas tentunya akan berdampak kepada angka partisipasi sekolah di tingkat SLTP.

Angka rasio SD/SLTP yang ideal tentunya tidak dapat dipatok begitu saja karena akan sangat tergantung kepada kondisi dan luas wilayah kabupaten tersebut. Namun bisa dipastikan bahwa semakin luas wilayah kabupaten semakin banyak dibutuhkan jumlah SD dan SLTP agar dapat menjangkau semua penduduk usia sekolah. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Agam yang memiliki luas wilayah relatif dibanding dua kabupaten yang lain tentunya lebih mudah menyebarkan pelayanan pendidikan. Kedua kabupaten juga memiliki rasio SD/SLTP yang hampir sama, namun sekolah di Kabupaten Indramayu melayani wilayah yang relatif kecil dibanding yang lain. Kabupaten Indramayu diuntungkan dengan wilayah yang kecil dan kompak, sehingga lebih memudahkan untuk menyebarkan pelayanan. Sedangkan Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar di daratan pulau Sumatra dan di beberapa pulau, sehingga relatif sulit untuk menyebarkan pelayanan pendidikan. Dibutuhkan sekolah yang lebih banyak jumlahnya di Bengkalis dengan jumlah siswa yang relatif sedikit dibanding dengan kabupaten lainnya.

Tabel 7. Perbandingan jumlah SD/MI dan SLTP Empat Kabupaten Tahun 2007

Uraian	Indramayu	Sambas	Bengkalis	Agam
Jumlah SD/MI	997	395	476	458
Jumlah SLTP	221	49	190	105
Rasio SD/SLTP	4.5	8.1	2.5	4.4
Luas (km ²)	2,040	6,396	10,983	2,322
Rasio luas/SD	2.0	16.2	23.1	5.1
Rasio Luas/SLTP	9.2	130.5	57.8	22.1

Sumber: BPS Kabupaten dalam angka masing-masing daerah tahun 2008

Dari sisi angka partisipasi, pencapaian tiga kabupaten yaitu Bengkalis, Agam, dan Sambas berada dibawah angka rata-rata nasional di tahun 2007, khususnya untuk tingkat SLTP. Sementara itu pencapaian angka partisipasi di Indramayu sudah berada di atas rata-rata nasional. Untuk tingkat SD, ke empat kabupaten sudah mendekati angka rata-rata nasional, bahkan ada yang sudah di atas rata-rata nasional.

Table 8. Perbandingan APK dan APM

Daerah	Tahun	SD/MI		SLTP	
		APK	APM	APK	APM
Sambas	2001	112.6	92.2	53.4	39.0
	2007	133.3	96.3	78.7	55.2
Bengkalis	2000	109.1	96.6	68.7	60.2
	2007	119.1	97.3	69.2	62.1
Indramayu	2001	106.1	91.5	67.8	52.5
	2007	103.8	98.6	91.8	80.2
Agam	2001	105.2	91.5	72.2	55.1
	2007	108.1	93.4	78.6	61.3
Rata-Rata Nasional	1999/2000	111.9	94.5	71.7	55.7
	2007/2008	115.5	94,9	92.5	71,6
Target Nasional	2015	115.2		81.4	

Sumber: Handra(2005d), Indikator Pendidikan di Indonesia 2007/2008

Dari data angka partisipasi, yang agak mengkhawatirkan terkait dengan pencapaian MDGs adalah Kabupaten Sambas. APM SLTP di Sambas pada tahun 2007 masih 55%, jauh dibawah rata-rata nasional 71,6% di tahun 2007. Demikian juga angka APK SLTP nya yang hanya 78,7% pada tahun 2007. Meskipun kinerja pelayanan pendidikan kabupaten Sambas meningkat cukup baik, namun karena awalnya sudah tertinggal jauh, pencapaian target MDGs untuk tingkat SLPT di tahun 2015 terancam. Apalagi Sambas yang luas wilayah cukup besar, harus memperbanyak jumlah SLTP untuk mampu menampung seluruh tamatan SD/MI dengan kemampuan keuangan yang relatif terbatas.

Kinerja pelayanan pendidikan tingkat SLTP untuk Kabupaten Bengkalis dan juga memprihatinkan dan berada jauh dibawah angka rata-rata nasional. Peningkatan angka APK dan APM untuk tingkat SLTP di kedua kabupaten relatif sangat rendah dalam periode 2001-2007 dibanding dengan peningkatan di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Bengkalis dengan kemampuan keuangan yang sangat baik ternyata hanya mampu meningkatkan 1-2 point angka APK dan APM SLTP nya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak ada jaminan bahwa kemampuan keuangan yang tinggi akan digunakan semaksimal mungkin bagi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pencapaian MDGs

5.5. Ketimpangan Pelayanan Bidang Kesehatan dan Pencapaian MDGs

Perbandingan beberapa indikator di bidang kesehatan memperlihatkan bahwa Kabupaten Indramayu mengalami kemajuan pesat. Secara umum memang terlihat bahwa ke empat daerah mengalami kemajuan. Namun kemajuan yang dicapai Indramayu memang spektakuler. Dalam hal angka kematian bayi sebagai contoh, Indramayu menurun tajam dari 53.8 bayi per 1000 kelahiran di tahun 2002 menjadi hanya 11,5. Demikian juga dengan angka prosentase penduduk yang tidak punya akses terhadap pelayanan kesehatan, Kabupaten Indramayu mengalami kemajuan pesat. Salah satu penyebab membaiknya indikator ini adalah karena Indramayu diuntungkan dengan wilayah yang kompak dan relatif kecil yang kemudian didukung oleh program Jamkesmas. Di tahun 2007 pencapaian indikator prosentase penduduk yang punya akses terhadap pelayanan kesehatan telah mencapai 87,4%. Peningkatan ini terutama disebabkan karena sebagian besar penduduk miskin telah dijamin untuk bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan di Indramayu.

Tabel 9. Akses Penduduk Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Tingkat kematian bayi

Kabupaten	Prosentase Penduduk yang Tidak Punya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan			Tingkat kematian bayi per 1000 kelahiran			Prosentase RT Menggunakan Air Bersih
	1999	2002	2007	1999	2002	2007	
Agam	21.7	17.1	13.4	36	38.8	17.5	42
Bengkalis	48.9	49.9	24.6	34	31.9	28	29

Sambas	33.6	51.3	32.5	85	79.6	36	11
Indramayu	30.4	25.8	12.6	57	53.8	11.5	53
Indonesia	21.6	23.1	n.a.	45	43.5	n.a	n.a

Sumber: Laporan HDP Indonesia 2004, BPS masing-masing daerah

Air bersih adalah salah satu faktor untuk mendukung hidup sehat. Sehingga akses penduduk terhadap air bersih akan sangat menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Namun hal ini justru yang paling memprihatinkan di ke empat Kabupaten. Dari data yang ada ternyata jumlah rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih di ke empat daerah sangat rendah. Di ke empat kabupaten, hanya penduduk di Indramayu yang mencapai angka lebih dari 50%, sedangkan yang lain dibawah itu. Sambas dan Bengkalis berada di posisi paling jelek karena sebagian besar wilayah daerah ini adalah wilayah rawa-rawa dengan kualitas air permukaan dan air bawah tanah yang sangat rendah. Padahal hampir sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pantai yang merupakan perairan dalam Indonesia.

Terkait dengan pencapaian MDGs di bidang kesehatan, indikator menunjukkan bahwa daerah yang terancam sulit mencapai target MDGs adalah Kabupaten Sambas. Di daerah ini, tingkat kematian bayi masih tinggi dan prosentase penduduk yang dapat mengakses pelayanan masih rendah. Daerah lainnya yang relatif sulit mencapai target MDGs di bidang kesehatan adalah kabupaten Bengkalis. Kabupaten ini sangat luas dengan penduduk yang sangat menyebar. Meskipun daerah ini punya kemampuan keuangan yang sangat tinggi, tidak ada jaminan akan mampu mencapai target MDGs di tahun 2015. Sedangkan untuk kabupaten Agam dan Indramayu, target MDGs diperkirakan akan capat dicapai pada tahun 2015.

5.6. Analisis Alokasi Belanja Daerah Untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pencapaian beberapa indikator di dua bidang pelayanan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu bergerak lebih cepat. Kondisi ini konsisten dengan analisis pada bab sebelumnya dimana Indramayu juga terlihat mengalami peningkatan angka IPM tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dari analisis terhadap alokasi belanja ternyata terlihat bahwa APBD kabupaten Indramayu yang dialokasi untuk bidang pendidikan dan kesehatan adalah 46% jauh di atas Bengkalis yang hanya 21%, namun masih dibawah Kabupaten Agam 52,6%. Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan memperlihatkan bahwa kabupaten Indramayu dan Agam serius untuk meningkatkan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari segi jumlah, anggaran belanja bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Indramayu lebih rendah dari anggaran pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bengkalis. Total anggaran Bengkalis untuk pendidikan dan kesehatan tahun 2007 adalah sekitar 601 milyar rupiah, sedangkan anggaran yang sama di Indramayu hanya 485 milyar rupiah. Padahal jumlah penduduk Indramayu hampir tiga kali jumlah penduduk Bengkalis. Jadi apabila anggaran yang kecil di Indramayu dapat meningkatkan indikator pelayanan lebih tinggi dari indikator di Bengkalis, berarti alokasi anggaran di Indramayu jauh lebih efektif dan efisien dibanding alokasi anggaran Bengkalis.

Tabel 10. Alokasi Belanja Daerah Tahun 2007

Bidang	Jenis Belanja	Bengkalis	Indramayu	Sambas	Agam
Pendidikan	Tidak Langsung	189,966	310,471	155,268	227,795
	Langsung	235,256	89,486	56,403	52,912
	Jumlah	425,222	399,957	211,671	280,707
Kesehatan	Tidak Langsung	55,182	41,683	25,203	32,049
	Langsung	120,413	43,894	36,957	27,314
	Jumlah	175,595	85,577	62,160	59,363
Total Belanja Daerah		2,894,249	1,058,921	588,617	646,671
Prosentasi Belanja Pendidikan		14.7%	37.8%	36.0%	43.4%
Prosentasi Belanja Kesehatan		6.1%	8.1%	10.6%	9.2%
Prosentasi Pendidikan+Kesehatan		20.8%	45.9%	46.5%	52.6%

Sumber: diolah dari data APBD masing-masing Kabupaten

Alokasi anggaran Kabupaten Sambas untuk Pendidikan dan Kesehatan terlihat cukup besar yaitu sekitar 46,5%. Namun kalau dianalisis lebih dalam lagi, tabel 10 memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja tersebut terutama untuk belanja tidak langsung terutama belanja pegawai. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Agam. Kabupaten Bengkalis berada di posisi keuangan yang paling kuat sebagaimana terlihat pada tabel 11. Kabupaten ini hanya terbebani sebesar 13,4% dari anggarannya untuk belanja pegawai. Dengan kata lain, Kabupaten Bengkalis punya keleluasan luar biasa untuk mengalokasikan anggarannya. Namun, kalau diperhatikan tabel 10, Kabupaten Bengkalis terlihat kurang serius untuk mengalokasikan anggarannya dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, karena alokasinya hanya sekitar 21% di tahun 2008.

Tabel 11. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Total

Tahun	Kab. Agam	Kab. Bengkalis	Kab. Indramayu	Kab. Sambas
2001	66.3%	16.6%	66.0%	53.5%
2002	59.1%	10.2%	50.4%	49.7%
2008	53.2%	13.4%	48.0%	40.7%

Sumber: Diolah dari data APBD masing-masing Kabupaten dan data di Ditjen PK, Depkeu, RI.

6. Kesimpulan

Data menunjukkan bahwa jumlah dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah telah meningkat drastis dari sekitar 15% pendapatan dalam negeri (PDN) di tahun 1999 menjadi 36% PDN di tahun 2008. Karena sebagian besar dana transfer tersebut merupakan dana yang bebas dialokasikan oleh Pemda, maka berarti Pemda memiliki keleluasaan yang besar untuk mengalokasikannya bagi peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam delapan tahun terakhir memperlihatkan bahwa Pemerintah konsisten menjalankan desentralisasi fiskal.

Demikian juga dari sisi pemerataan, dalam 8 tahun desentralisasi telah terjadi redistribusi dana ke luar Jawa. Namun angka koefisien variasi memperlihatkan bahwa ketimpangan fiskal antar daerah kabupaten/kota dalam periode 2001-2008 tidak mengalami perbaikan dan juga tidak mengalami pemburukan. Kondisi yang sama juga diperlihatkan oleh angka indeks williamson (IW) dimana ketimpangan fiskal antar daerah tidak mengalami perbaikan. Studi kasus empat daerah (kabupaten Agam, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sambas) memperlihatkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan fiskal antar keempat daerah. Perbandingan belanja per kapita antara Kabupaten Bengkalis (terkaya) dengan Kabupaten Indramayu (termiskin) menurun dari 10:1 di tahun 2002 menjadi 6:1 di tahun 2008. Artinya, walaupun terjadi peningkatan belanja daerah per kapita di seluruh kabupaten, tidak memperlebar jarak antara yang terendah dengan yang tertinggi.

Terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pelayanan publik antar daerah, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan fiskal tidak terkait langsung dengan ketimpangan tingkat pelayanan, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Temuan ini berbeda dengan temuan Handra(2005a) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pelayanan publik antar daerah berpotensi semakin melebar akibat ketimpangan fiskal antar daerah.

Studi kasus empat kabupaten dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Indramayu yang memiliki kemampuan fiskal yang jauh lebih rendah dari Kabupaten Bengkalis ternyata mampu meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatannya lebih cepat. Diantara empat kabupaten tersebut, yang paling tinggi peningkatan angka IPMnya dalam periode 2002-2007 adalah Indramayu dengan peningkatan sebesar 5,02 poin jauh lebih tinggi dari peningkatan IPM Kabupaten Bengkalis. Indikator pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Indramayu juga memperlihatkan peningkatan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Bengkalis. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kemampuan fiskal daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja pelayanan di daerah. Salah satu kunci keberhasilan Kabupaten Indramayu adalah alokasi anggaran yang terfokus pada pelayanan pendidikan dan kesehatan dan didukung oleh partisipasi masyarakat.

Terkait dengan pencapaian target MDGs, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dua kabupaten, Sambas dan Bengkalis terancam tidak dapat mencapai target MDGs di bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun 2015. Kedua kabupaten ini kesulitan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan karena wilayah

yang luas dan penduduk yang tersebar. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pelayanan pendidikan dan kesehatan di kedua daerah ini yang berada di bawah rata-rata nasional dan jauh dari target MDGs, serta peningkatan indikator yang relatif rendah dalam periode 2005-2007. Namun Kabupaten Bengkalis berada di posisi yang lebih baik dibanding Kabupaten Sambas, apalagi didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang besar untuk mewujudkan target MDGs tersebut.

Daftar Pustaka

- Bahl, Roy, 1998, Implementation Rules For Fiscal Decentralization, a Paper for Presentation at the International Seminar on Land Policy and Economic Development during the 30th Anniversary Celebration of the Land Reform Training Institute, Tuesday, November 17, 1998, Taiwan.
- Bappenas, 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia.
- Commonwealth Grant Commission 2002, *State Revenue Sharing Relativities: 2002 Update*, available at <http://www.cgc.gov.au>, accessed by August 2002.
- Davey, Kenneth, 2003, Fiscal Decentralisation, Working Paper.
- Davey, Kenneth, 1989, 'Central-Local Financial Relations', Chapter 6 in Devas et al., *Financing Local Government in Indonesia*, Monographs in International Studies, South East Asia Series No. 84, Ohio University.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Indikator Pendidikan di Indonesia 2007/2008.
- Devas, Nick, 1994, *Local Government Finance in Britain*, Institute of Local Government Studies, School of Public Policies, The University of Birmingham, England.
- Devas, Nick, 1989, 'Local Government Finance in Indonesia: An Overview', Chapter 1 in Devas et al., *Financing Local Government in Indonesia*, Monographs in International Studies, South East Asia Series No. 84, Ohio University.
- Fiscal Federalism in Canada 1981, *Report of the Parliamentary Task Force on Federal-Provincial Fiscal Arrangements*, Minister of Supply and Services, Canada.
- Faquet, Jean-Paul, 1997, *Decentralization and Local Government Performance*, Working Group 6: Decentralization and Natural Resources Management, paper available at (accessed August 2002) <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/cd/JPFaquet.pdf>.
- Handra, Hefrizal, 2006, 'Inequality in the Level of Local Public Services in Indonesia: An Observation of the Condition in the Early Stages of Decentralisation', *Jurnal Sosiologi SIGAI Vol. VII No.11* April 2006.
- Handra, Hefrizal, 2005a, 'Potential Factors for Greater Inequality in The Level of Local Services between Localities: The Case of Indonesia in the Early Stages of Decentralisation', *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. XIV No.1, Juli 2005*.
- Handra, Hefrizal, 2005b, 'Non-Governmental Involvement in Educational Services in Indonesia: The Case of Six Localities', *Proceeding 2nd International Conference of the Asian Academy of Applied Business*, Padang, 30 July 2005.
- Handra, Hefrizal, 2005c, 'Measuring the Degree of Fiscal Disparities between Local Governments: A Case of Indonesia', *Proceeding Seminar Nasional Matematika dan Statistika*, Padang 6 Agustus 2005.
- Handra, Hefrizal, 2005d, 'A Study of Indonesia's Fiscal Equalisation Mechanism in the Early Stages of Decentralisation', *Ph.D Thesis*, Flinders University of South Australia.
- Lotz, Joergen R. 1997, 'Denmark and Other Scandinavian Countries: Equalisation and Grants', Chapter 7 in *Financing Decentralized Expenditures: An International Comparison of Grants*, edited by Ehtisham Ahmad, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK.
- Ma, Jun, 1997, *Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries (Cases of the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, and India)*, Technical Background Paper, Prepared for Macroeconomic Management and Policy Division Economic Development Institute, The World Bank.

- Mathews, Russell. 1994, *Fiscal Equalisation -Political, Social and Economic Linchpin of Federation*, The Inaugural Russell Mathews Lecture on Federal Financial Relations, Federalism Research Centre, Australian National University, Canberra.
- Prudhomme, Remy, 1995, 'The dangers of decentralization', *The World Bank Observer*, Cary:Aug 1995. Vol.10, Iss. 2, p.201 (20 pages).
- Rye, Richard C. & Searle, Bob 1997, 'Expenditure Needs: Institution and Data', Chapter 3 in: *Financing Decentralized Expenditures: An International Comparison of Grants*, edited by Ehtisham Ahmad, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK.
- Spahn, Paul Bern, 1997, 'Intergovernmental Transfers in Switzerland and Germany', Chapter 5 in *Financing Decentralized Expenditures: An International Comparison of Grants*, edited by Ehtisham Ahmad, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK.
- Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2007), *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Investasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Laporan Penelitian.
- Undang undang 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang undang 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Walsh, Cliff & Thomson, Norm, 1994, *Federal Fiscal Arrangements in Australia: Their Potential Impact on Urban Settlement*, Federalism Research Centre, ANU, Canberra.